SKRIPSI

PERAN DUKUNGAN VANUATU MELALUI FORUM MELANESIAN SPEARHEAD GROUP TERHADAP GERAKAN PAPUA MERDEKA

TAHUN 2019-2020

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Septiana Jumakhirus Siska

NIM. E1112211023

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PERAN DUKUNGAN VANUATU MELALUI FORUM MELANESIAN SPEARHEAD GROUP TERHADAP GERAKAN PAPUA MERDEKA

TAHUN 2019-2020

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

Septiana Jumakhirus Siska

NIM. E1112211023

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN DUKUNGAN VANUATU MELALUI FORUM MELANESIAN SPEARHEAD GROUP TERHADAP GERAKAN PAPUA MERDEKA TAHUN 2019-2020

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Septiana Jumakhirus Siska

NIM. E1112211023

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A.

NIP: 199212172020121008

Tanggal : 15 - 7 - 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Laras Putri Olifiani, S.IP., M.H.I.

NIP: 199204232019032013

Tanggal : 15 - 7 - 2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DUKUNGAN VANUATU MELALUI FORUM MELANESIAN SPEARHEAD GROUP TERHADAP GERAKAN PAPUA MERDEKA TAHUN 2019-2020

Oleh:

Septiana Jumakhirus Siska

NIM. E1112211023

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025

Waktu : 13.00-15.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 4

Tim Penguji

Ketua

Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A.
NIP: 199212172020121008

Sekretaris

Laras Putri Olifiani, S.IP., M.H.I.
NIP: 199204232019032013

Penguji Utama

Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A.
NIP: 198609142019032005

Penguji Pendamping

Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP: 198701072023211017

Disahkan oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP: 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dukungan Vanuatu terhadap gerakan Papua Merdeka melalui Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) pada periode 2019–2020. Vanuatu merupakan negara kepulauan di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Papua Barat, khususnya melalui pendekatan diplomasi di tingkat regional. Dalam konteks ini, MSG menjadi forum utama yang dimanfaatkan Vanuatu untuk menyuarakan isu pelanggaran hak asasi manusia dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis dilakukan menggunakan teori peran (Role Theory) dari Cameron G. Thies (2009) yang terdiri dari empat indikator utama: *role conception, role Enactment, role expectations, dan role location*. Keempat indikator ini digunakan untuk mengkaji bagaimana Vanuatu memahami dan menjalankan perannya di tingkat regional, serta bagaimana peran tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi aktor-aktor eksternal dalam MSG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan Vanuatu terhadap Papua tidak hanya didasari oleh faktor etnis Melanesia, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi identitas nasional yang menekankan nilai-nilai anti-kolonialisme, solidaritas budaya, dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Vanuatu secara aktif mengusulkan keanggotaan penuh ULMWP di MSG dan menyerukan agar Indonesia dicabut dari keanggotaan asosiasi karena dianggap bukan bagian dari komunitas etnis Melanesia. Meskipun menghadapi resistensi dari beberapa anggota MSG lainnya, Vanuatu tetap mempertahankan posisinya sebagai negara yang vokal dan konsisten dalam mengadvokasi kemerdekaan Papua.Temuan ini menunjukkan bahwa aktor negara kecil seperti Vanuatu dapat memainkan peran signifikan dalam isu internasional melalui diplomasi berbasis nilai dan identitas. Penelitian ini juga menegaskan bahwa forum regional seperti MSG memiliki peran penting dalam membentuk dinamika politik kawasan, khususnya terkait isu dekolonisasi dan hak penentuan nasib sendiri.

Kata Kunci: Diplomasi Regional, Melanesian Spearhead Group (MSG), Papua Merdeka, *Role Theory*, Solidaritas Melanesia, Vanuatu.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Vanuatu's support for the Papua Merdeka movement through the Melanesian Spearhead Group (MSG) during 2019–2020. Vanuatu, an archipelagic country in the South Pacific, has consistently shown solidarity with the struggle for West Papua's independence, especially through regional diplomacy. Within this context, MSG serves as the main forum Vanuatu uses to raise issues of human rights violations and the right to self-determination for the Papuan people. This study applied a descriptive qualitative approach with data collected through a literature review. The analysis is based on Cameron G. Thies' (2009) Role Theory, which includes four main indicators: role conception, role enactment, role expectations, and role location. These indicators are used to examine how Vanuatu understands and performs its role at the regional level and how external actors' expectations within MSG influence that role. The findings show that Vanuatu's support for Papua is grounded in similarity to Melanesian ethnicity and is shaped by its national identity, which emphasizes anti-colonialism, cultural solidarity, and commitment to human rights. Vanuatu actively proposed full membership for ULMWP in MSG and urged the removal of Indonesia's associate membership. Arguing that Indonesia is not part of the Melanesian ethnic community. Despite resistance from several MSG members, Vanuatu has consistently advocated for Papua's independence. These findings demonstrate that small states like Vanuatu can play a significant role in international issues through value-based and identity-driven diplomacy. The study also highlights the importance of regional forums such as MSG in shaping political dynamics in the region, particularly in matters of decolonization and self-determination.

Keywords: Melanesian Solidarity, Melanesian Spearhead Group (MSG), Papua Merdeka, Regional Diplomacy, Role Theory, Vanuatu.

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *"Peran Dukungan Vanuatu Melalui Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Gerakan Papua Merdeka Tahun 2019–2020"*. Judul ini dipilih karena Vanuatu merupakan negara kecil di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap gerakan Papua Merdeka, terutama melalui Forum Melanesian Spearhead Group (MSG). Dukungan ini didasarkan pada solidaritas etnis Melanesia, nilai-nilai anti-kolonialisme, serta semangat *Melanesian Renaissance* yang telah melekat dalam kebijakan luar negerinya. Selain itu, isu Papua juga menjadi agenda sensitif dalam hubungan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik, sehingga menarik untuk diteliti dalam konteks peran diplomatik Vanuatu.

Penelitian ini membatasi kajian pada peran Vanuatu melalui MSG pada tahun 2019–2020 dengan rumusan masalah utama yaitu bagaimana peran yang dimainkan oleh Vanuatu dalam mendukung gerakan Papua Merdeka melalui Forum Melanesian Spearhead Group (MSG). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teori peran (Role Theory) dari Cameron G. Thies yang mencakup empat indikator utama: *role conception, role Enactment, role expectations, dan role location*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dari berbagai sumber resmi dan akademik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Vanuatu dalam MSG dilakukan secara aktif dan konsisten. Vanuatu memosisikan dirinya sebagai

advokat regional dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dengan mengangkat isu tersebut ke forum-forum internasional, mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG, serta menyerukan pencabutan status Indonesia sebagai anggota asosiasi MSG. Namun, Vanuatu juga menghadapi tantangan dari negara anggota MSG lain seperti Papua Nugini dan Fiji yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia.

Saran dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi regional yang lebih inklusif dan berbasis dialog, serta memperhatikan nilai-nilai budaya Melanesia dalam pendekatannya. Vanuatu diharapkan tetap menjunjung tinggi komitmen moralnya sambil mempertimbangkan stabilitas kawasan. Forum MSG disarankan menjadi wadah dialog yang adil dan damai. Selain itu, pendekatan diplomasi damai dan berbasis hak asasi manusia oleh organisasi pro-Papua juga sangat penting untuk memperoleh dukungan internasional yang kredibel dan berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Septiana Jumakhirus Siska
Nomor Mahasiswa	: E1112211023
Program Studi	: Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengatahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 15 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



(Septiana Jumakhirus Siska)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah” (Qs. Hud: 88)

"Jangan menunggu pengakuan dari mereka yang tidak tau lelahmu. Perjuangan ini bukan untuk tepuk tangan, tapi untuk dirimu sendiri—yang suatu hari nanti akan melihat ke belakang dan berkata: 'Aku berhasil karena aku tidak berhenti.'"

Persembahan:

1. Teruntuk kedua orang tua penulis yaitu Almarhum Bapak Ruslan dan Almarhumah Ibu Jamilah, yang meski telah tiada namun tetap hidup dalam setiap doa dan langkah penulis. Terima kasih atas cinta yang abadi, doa-doa yang tidak pernah putus, dan nilai-nilai hidup yang kalian tanamkan kepada penulis sejak kecil. Semoga pencapaian sederhana ini menjadi bukti bahwa anakmu terus berjuang, sebagaimana yang telah kalian ajarkan dulu. Semoga Allah SWT melapangkan tempat peristirahatan kalian dan mempertemukan kita kembali dalam kebahagiaan yang abadi.
2. Teruntuk saudara kandung penulis Femirabesal, M. Demi Zuhardi, Pebri Syanubari, Meydiyan Shaputra, dan Julyanto Purnomo, serta saudara ipar dan para keponakan. Penulis ucapkan terimakasih kepada semuanya karena telah dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab menggantikan peran Bapak dan Ibu sejak kepergian mereka. Terima kasih atas pengorbanan yang mungkin tidak pernah terucap, atas segala dukungan finansial, semangat dan perhatian yang tidak pernah berhenti, meskipun kadang harus menunda

keinginan pribadi demi masa depan penulis. Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran dan pengorbanan kalian. Terima kasih telah menjadi rumah, pelindung, dan juga penuntun. Semoga keberhasilan kecil ini bisa menjadi bagian dari kebanggaan kalian juga.

3. Teruntuk Safitri Solehah, Faela Sufah, Agustianingsih dan Naysilla Putri Irwana. Terima kasih telah menjadi orang terdekat penulis yang selalu mendukung apapun hal yang penulis lakukan. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat dari kalian pada saat penulis melangsungkan pengerjaan skripsi ini. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi. Penulis harap kita akan terus seperti ini hingga kelak nanti.
4. Teruntuk Bela Puspita Sari. Terima kasih atas dukungan selama ini sejak awal masuk kuliah. Terima kasih atas dukungan dan tekad untuk lulus bersama sehingga penulis merasa ada dukungan secara emosional untuk segera menyelesaikan apa yang sudah dimulai ini. Terima kasih juga atas dukungan dan perhatian orang tua Bela sejak pertama kali bertemu penulis, penulis merasakan kembali kehadiran orang tua yang telah hilang cukup lama. Penulis harap kita akan terus seperti ini meskipun akan terpisah oleh jarak untuk menuju kesuksesan masing-masing.
5. Teruntuk Fanya Mahavira Putri, Christian Vasco Bornero, Tirta Rahayu Ningsih, Dian Karimah, dan Angelitha Febri Wulandari. Terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, baik secara emosional dan juga tenaga dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas

informasi penting yang selalu diberitahukan kepada penulis terkait perkuliahan terutama pada fase skripsi. Semoga segala perbuatan baik yang kalian lakukan kepada penulis menjadi amal jariyah yang bisa menjadi catatan baik kalian kepada malaikat. Penulis berharap kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah ini sebagai tuaian kebaikan yang sudah kalian tanam sebelumnya.

6. Teruntuk teman-teman Kelas Prodi Hubungan Internasional PPAPK 2021. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan ini. Semoga kita tetap berteman kelak walaupun jalan kita sudah berbeda dalam meraih kesuksesan dan cita-cita. *See u on top guys*
7. Teruntuk diri sendiri, terima kasih karena memilih bertahan dijalan yang sudah dipilih ini. Terima kasih atas perjuangan, rasa takut, dan tangis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah berjuang begitu keras karena memilih untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai hingga tuntas. Skripsi ini merupakan langkah awal menuju gerbang kesuksesan, mari jemput *goals* lain dan wujudkan *wish list* yang didambakan selama ini. *Let's keep going and achieve success!*.

Sincerely,

Septiana Jumakhirus Siska

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul ”Peran Dukungan Vanuatu Melalui Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) Terhadap Gerakan Papua Merdeka Tahun 2019-2020” tepat pada waktunya.

Adapun maksud dan tujuan penulisan penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Hubungan Internasional. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si Selaku Koordinator Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Drs. Abdul Rahim, M.Si Selaku Ketua Program PPAPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
5. Dr. Ira Patriani, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Dosen Pembimbing Akademik.

6. Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A. dan Laras Putri Olifiani, S.IP., M.HI. Selaku Dosen Pembimbing dalam Penelitian ini.
7. Dewi Suratiningsih, S.IP., M.A. dan Posmanto Marbun, S.IP., M.A. Selaku Dosen Penguji dalam Penelitian ini.
8. Staff Akademik dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
9. Teman-teman terdekat, serta teman-teman di kelas Hubungan Internasional PPAPK tahun 2021, terimakasih atas kebersamaan dan juga suka duka bersama selama menjalani proses perkuliahan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis menyadari proposal penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan juga bagi semua pihak yang membaca.

Pontianak, 30 Juli 2025

Septiana Jumakhirus Siska

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR BAGAN ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1.Latar Belakang Penelitian 1
1.2.Identifikasi Masalah Penelitian 13
1.3.Fokus Penelitian. 14
1.4.Rumusan Masalah. 14
1.5.Tujuan Penelitian 14
1.6. Manfaat Penelitian 15
1.6.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis 15
1.6.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
2.1 Teori Peran (*Role Theory*) 16
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 21
2.3 Kerangka Pikir 31

2.4 Pertanyaan Penelitian 32
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Jenis Penelitian 33
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 40
3.3.1 Lokasi Penelitian 40
3.3.2 Waktu Penelitian..... 41
3.4 Unit Analisa dan Eksplanasi 41
3.4.1 Unit Analisa..... 42
3.4.2 Unit Eksplanasi..... 43
3.5 Teknik Pengumpulan Data 44
3.6 Instrumen pengumpulan Data 45
3.7 Analisis Data 46
3.7.1 Keabsahan Data 46
3.7.2 Teknik Analisa Data 48
BAB IV GAMBARAN UMUM 52
4.1 Profil Negara Vanuatu 52
4.1.1 Sejarah dan Latar Belakang Kemerdekaan Vanuatu 53
4.1.2 Sistem Pemerintahan Vanuatu 56
4.1.3 Pandangan Politik Vanuatu terhadap Isu Hak Asasi Manusia dan Dekolonisasi..... 58
4.1.4 Sikap Historis Vanuatu terhadap Papua Barat 61
4.2 Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) 63
4.2.1 Sejarah Pembentukan dan Tujuan Forum MSG..... 64
4.2.2 Struktur Keanggotaan dan Mekanisme Keputusan 65
4.2.3 Peran MSG dalam Isu Regional Melanesia 68
4.3 Papua dan Gerakan Papua Merdeka 69
4.3.1 Latar Belakang Konflik Papua 70
4.3.2 Aktor-Aktor dalam Gerakan Papua Merdeka..... 74
4.3.3 Isu Papua dalam Forum Internasional dan Regional 78

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 81

5.1 Konsepsi Peran Vanuatu dalam Isu Papua Merdeka di Tingkat Regional melalui Forum Melanesian Spearhead Group Tahun 2019-2020 81

5.2 Pelaksanaan Peran Vanuatu dalam Mendukung Gerakan Papua Merdeka melalui Forum Melanesian Spearhead Group Tahun 2019-2020 88

5.3 Ekspektasi Anggota Melanesian Spearhead Group terhadap Peran Vanuatu dalam Isu Papua Merdeka dan Pengaruhnya terhadap Tindakan Diplomatik pada Tahun 2019-2020 96

5.4 Penempatan Peran Vanuatu dalam Konstelasi Politik Melanesian Spearhead Group Terkait Isu Papua Merdeka pada Tahun 2019-2020 103

BAB VI PENUTUP 110

6.1 Kesimpulan 110

6.2 Saran 112

6.3 Keterbatasan Penelitian 113

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN 125

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel

2.1 Penelitian Yang Relevan..... 20
3.1 Waktu Penelitian 41
5.1 Bukti dan Aktualisasi Peran Vanuatu dalam Isu Papua Barat 95
5.2 Ekspektasi Negara-Negara Msg Terhadap Peran Vanuatu Dalam Isu Papua Barat Dan Dampaknya Terhadap Respons Diplomatik (2019–2020)..... 100
5.3 Pengakuan Regional Terhadap Peran Moral Vanuatu Dalam Forum Msg Terkait Isu Papua Barat (2019–2020)..... 105
5.4 Aktivitas Diplomatik Vanuatu Yang Mencerminkan Role Location Dalam Isu Papua Barat (2019–2020)..... 108

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2.1 Kerangka Alur Pikir Penelitian 30
4.1 Struktur Keanggotaan MSG 65
4.2 Timeline Konflik Papua..... 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

4.1 Bendera Negara Vanuatu 58
4.2 Logo Resmi MSG..... 63
4.3 Lambang OPM 75
4.4 Bendera OPM..... 75
4.5 Lambang United Liberation Movement For West Papua..... 76
4.6 Logo KNPB 77
4.7 Logo Aliansi Mahasiswa Papua 77
5.1 Aksi Demonstrasi Di Port Vila, Vanuatu Tahun 2019 87
5.2 Pidato Resmi Perdana Menteri Vanuatu Pada Sidang Umum PBB Ke-74 Tahun 2019..... 86
5.3 Charlot Salwai dan Ralph Regenvanu bertemu langsung dengan Pimpinan ULMWP 89
5.4 pertemuan resmi delegasi MSG dengan ULMWP 90
5.5 Pertemuan Para Pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) 92
5.6 Menteri Luar Negeri Vanuatu Melalukan Kunjungan Diplomatik Menjelang KTT 93
5.7 Aksi Demonstrasi Untuk ULMWP Ditetapkan Sebagai Anggota Penuh MSG 94
5.8 Benny Wenda Memimpin Demonstrasi Untuk Status Anggota ULMWP 94

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Isu Papua merdeka menjadi salah satu perdebatan pada kawasan Pasifik, di mana Vanuatu secara konsisten menunjukkan dukungannya terhadap gerakan ini. Salah satu upaya Vanuatu dalam memperjuangkan isu tersebut dilakukan melalui Forum Melanesian Spearhead Group (MSG), yang mana pada forum ini Vanuatu menjalankan perannya untuk memengaruhi dinamika diplomasi di Kawasan serta respons Indonesia terhadap tuntutan kemerdekaan Papua. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Vanuatu memanfaatkan MSG sebagai sarananya dalam mendukung kemerdekaan bagi Papua pada periode 2019-2020.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu keamanan merupakan salah satu fokus utama dalam kajian Hubungan Internasional yang relevan sepanjang zaman. Berakhirnya Perang Dingin menandai munculnya harapan baru terhadap terciptanya tatanan dunia yang lebih damai dan aman. Selain itu, berakhirnya era bipolaritas yang ditandai dengan persaingan ideologis dan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet juga telah mengubah dinamika sistem internasional secara signifikan. Transisi ini membuka ruang bagi pendekatan baru dalam memahami dan menangani isu-isu keamanan global yang semakin kompleks dan multidimensional.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, tatanan hubungan internasional mengalami perubahan signifikan. Dunia kini dipenuhi oleh polarisasi yang mendorong negara-negara, baik dari dunia maju maupun berkembang, untuk mempertegas posisi dan eksistensinya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan, politik, dan ekonomi global, sering kali tidak ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Beragam pendekatan ditempuh oleh negara-negara untuk mengakomodasi perbedaan kepentingan dalam berbagai *region,* meskipun tantangan besar dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan tetap menjadi isu yang sulit diatasi.

Kerjasama antar negara dalam suatu region dapat memperkuat proses regionalisasi untuk mengatasi tantangan global yang akan datang (Mahendra, 2017). Meskipun demikian, perkembangan regionalisme pada awalnya sering kali berakar dari permasalahan khusus yang dihadapi oleh masing-masing *region*. Dalam sejarah, telah tercatat berbagai contoh bagaimana regionalisasi terwujud dalam bentuk kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan, yang masing-masing berperan penting dalam memperkuat integrasi regional dan respons terhadap isu-isu global.

Perkembangan regionalisme dalam politik internasional tidak terlepas dari sejumlah faktor penting. Selama Perang Dingin, regionalisme berkembang sebagai respons terhadap persaingan antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada masa itu, kepentingan regionalisme lebih banyak terkait dengan isu politik dan keamanan global. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah terbentuknya Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah organisasi regional

yang berlokasi di kawasan Pasifik. Kawasan Pasifik sendiri terdiri dari beberapa kepulauan yang tersebar di bagian tengah dan selatan Samudera Pasifik, yang kemudian dibagi menjadi tiga sub-kawasan: Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia (Sihaloho, dkk, 2021). Di antara ketiga sub-kawasan tersebut, hanya Melanesia yang memiliki organisasi regional, yakni Melanesian Spearhead Group (MSG), yang didirikan pada tahun 1988. Organisasi ini terdiri dari negara-negara dengan mayoritas etnis Melanesia, yang baru saja diakui kemerdekaannya, dan didirikan dengan semangat solidaritas etnis dan budaya serta komitmen yang kuat untuk bekerja sama.

Persamaan etnis Melanesia menjadi faktor utama dalam pembentukan organisasi regional ini, yang mendorong negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk menjalin kerjasama dalam rangka mempererat solidaritas serta meningkatkan kesamaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di antara negara-negara Melanesia (Adi dkk, 2022). Solidaritas antar negara anggota MSG terjalin erat berkat kesamaan etnis dan sejarah kolonial yang serupa. Keberadaan MSG sebagai forum regional yang mewadahi negara-negara dengan latar belakang ras yang sama memperkuat tanggung jawab moral negara-negara Melanesia untuk saling mendukung, termasuk dalam perjuangan Papua Barat. Dalam konteks ini, solidaritas etnis tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai landasan politis yang mempengaruhi sikap dan kebijakan luar negeri negara-negara anggota, seperti yang terlihat dalam tindakan diplomatik Vanuatu.

Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah forum regional yang terdiri dari negara-negara anggota dengan etnis Melanesia, termasuk Fiji, Papua Nugini,

Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Indonesia juga berstatus sebagai anggota asosiasi dalam organisasi ini, bersama dengan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) sebagai bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat (Faqih, 2020). Selain negara, MSG juga mengakomodasi organisasi-organisasi yang terlibat dalam isu-isu kawasan.

Salah satu negara anggota MSG, yaitu Vanuatu, merupakan negara beretnis Melanesia di kawasan Pasifik Selatan yang dengan tegas mendukung kemerdekaan Papua. Isu separatisme yang terjadi di Papua Barat, wilayah Indonesia di bagian timur, telah menarik perhatian dan keprihatinan besar dari Vanuatu, yang melihatnya sebagai bagian dari solidaritas etnis Melanesia dan perjuangan untuk hak-hak bangsa yang terjajah.

Vanuatu secara aktif menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua di Forum Melanesian Spearhead Group (MSG), dengan tujuan untuk menarik perhatian negara-negara Melanesia lainnya agar ikut memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh saudara sebangsa mereka di Papua Barat. Isu separatisme yang terjadi di Papua telah menarik perhatian internasional, terutama karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Papua Barat. Seiring berjalannya waktu, semakin terungkapnya pelanggaran tersebut mendorong negara-negara anggota MSG lainnya untuk menunjukkan keprihatinan dan memberikan perhatian lebih besar terhadap kasus ini.

Dukungan Vanuatu terhadap kemerdekaan Papua didasarkan pada solidaritas etnis Melanesia, di mana kedekatan emosional antar kedua pihak semakin menguat, terutama terkait dengan kekerasan terhadap hak asasi manusia yang dialami oleh

masyarakat Papua. Dengan komitmen yang konsisten, Vanuatu tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga secara terang-terangan mendukung perjuangan kemerdekaan Papua sebagai bagian dari penegakan prinsip *Melanesian Renaissance* (Kusuma dkk, 2021).

Sikap anti-kolonial Vanuatu didasarkan pada nilai-nilai *Melanesian Way* dan *Melanesian Renaissance* yang mencerminkan kesadaran budaya, identitas kebangsaan, serta perjuangan kolektif masyarakat Melanesia terhadap warisan kolonialisme. Konsep *Melanesian Way* diperkenalkan oleh Bernard Narokobi, seorang filsuf dan ahli hukum asal Papua Nugini, yang menekankan penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, musyawarah, dan penciptaan kepercayaan antar pihak tanpa kekerasan (Dorbin & Golub, 2020). Narokobi memandang penting untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat Melanesia baik dari kalangan akar rumput maupun elit dalam membangun kesadaran kolektif akan jati diri mereka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks ini, *Melanesian Renaissance* menjadi simbol kebangkitan budaya dan politik Melanesia yang telah lama ditekan oleh kekuasaan kolonial Eropa. Oleh karena itu, Vanuatu memandang dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan negara-negara baru di kawasan Melanesia, termasuk Papua Barat, sebagai bagian integral dari identitas regional mereka dan solidaritas antarkomunitas Melanesia.

Melanesian Way bukan hanya berasal dari Papua Nugini (PNG), melainkan juga menyebar ke Vanuatu, negara kepulauan yang sebagian wilayahnya pernah dijajah oleh Inggris dan sisanya oleh Prancis. Seorang diplomat Vanuatu, Ralph E. Orem Das, yang saat itu menjabat sebagai perwakilan tetap Vanuatu untuk PBB,

menyatakan bahwa *Melanesian Way* mengandung nilai-nilai yang sangat berpengaruh, terutama sebagai bagian dari semangat anti-kolonialisme. Ralph dikenal sebagai seorang diplomat yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mendukung berbagai perjuangan kemerdekaan, termasuk perjuangan Papua untuk merdeka (Hanafi & Annahda, 2022). Dalam berbagai kesempatan, Ralph secara aktif mengangkat isu kemerdekaan Papua di forum-forum regional maupun Internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ideologi nasionalis yang terkandung dalam *Melanesian Way* juga memengaruhi Perdana Menteri pertama Vanuatu, Walter Hadye Lini. Ia melihat adanya kebangkitan budaya yang kemudian dikenal sebagai *Melanesian Renaissance*. Walter Lini menjelaskan bahwa *Melanesian Renaissance* merujuk pada "kembalinya identitas dan tujuan kami, serta usaha untuk melestarikan dengan bebas hal-hal yang diberikan Tuhan untuk berkembang dengan cara kami sendiri, sesuai dengan nilai dan harapan kami" (Hanafi & Annahda, 2022). Konsep *Melanesian Renaissance* ini menjadi simbol identitas baru bagi bangsa Melanesia, yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan mereka sesuai dengan kehendak budaya dan nilai-nilai mereka sendiri.

Demi terwujudnya *Melanesian Renaissance*, Vanuatu secara konsisten memberikan dukungan diplomatik kepada Papua melalui berbagai forum internasional dan regional. *Melanesian Renaissance* sendiri berfungsi sebagai ikatan yang memperkuat kohesivitas etnis dan hubungan emosional antara negara-negara Melanesia (Temaluru, 2016). Melalui penyampaian di berbagai forum internasional, Vanuatu berusaha menarik perhatian komunitas global untuk turut

mendukung perjuangan kemerdekaan Papua, sebuah tujuan yang telah dijunjung tinggi oleh negara ini. Kebijakan politik Vanuatu, yang mendukung kemerdekaan Papua, dipengaruhi oleh sejumlah aspek, terutama aspek politik dan ekonomi. Melalui *Melanesian Renaissance*, Vanuatu mengangkat isu dekolonialisasi sebagai fokus utama, dengan komitmen untuk mendukung wilayah Melanesia yang masih terjajah, termasuk Papua dan Kaledonia Baru. Joe Natuman, sebagai Perdana Menteri, menegaskan bahwa Vanuatu memiliki komitmen kuat untuk membantu wilayah-wilayah Melanesia ini meraih kemerdekaan mereka.

Papua, wilayah di bagian timur Indonesia, memiliki penduduk yang sebagian besar berasal dari sub-ras Melanesia, yang juga merupakan asal etnis mayoritas di Vanuatu. Selama beberapa dekade, Papua telah menghadapi dinamika separatisme yang, menurut sejumlah laporan, terkait dengan persepsi ketidaksetaraan dan perlakuan berbeda dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya (Hanafi & Annahda, 2022). Isu kemerdekaan Papua menarik perhatian negara-negara Melanesia dan sering menjadi topik utama dalam pertemuan-pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG). Dalam forum-forum ini, Vanuatu secara konsisten menyuarakan dukungannya terhadap aspirasi kemerdekaan Papua (Zahidi, 2020), sekaligus mendorong negara-negara Pasifik Selatan lainnya untuk memberikan perhatian pada isu ini.

Papua adalah bagian dari wilayah timur Indonesia yang secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik di Papua bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda hingga setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 (Farukhi,

2018). Salah satu momen penting dalam sejarah integrasi Papua adalah pada 1 Mei 1963, ketika Indonesia mengambil alih administrasi wilayah Papua dari Belanda. Pada masa itu, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang mengubah sistem pemerintahan dan struktur sosial yang telah ada di wilayah tersebut.

Setelah integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan yang berdampak signifikan terhadap struktur sosial dan politik lokal. Salah satu kebijakan utama adalah pembubaran struktur pemerintahan lokal yang telah ada sebelumnya, disertai dengan pelarangan terhadap simbol-simbol identitas kultural dan politik Papua, seperti bendera Bintang Kejora dan lagu kebangsaan yang diciptakan oleh masyarakat Papua sebagai bentuk ekspresi nasionalisme (Farukhi, 2018). Kebijakan pelarangan ekspresi-identitas ini memicu ketegangan sosial dan politik di wilayah tersebut. Dalam merespons tekanan tersebut, sebagian masyarakat menunjukkan perlawanan, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi gerakan separatisme. Hingga saat ini, gerakan tersebut tetap menjadi tantangan utama dalam penyelesaian konflik di Papua.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah aktor utama dalam gerakan separatisme di Papua, yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial, politik, dan keamanan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua, termasuk kekhawatiran terhadap kehadiran militer di wilayah tersebut (Putra dkk., 2019). Melalui aksi dan propaganda, OPM berusaha menarik perhatian internasional terhadap isu Papua, termasuk melalui rekomendasi yang dihasilkan oleh Kongres Rakyat Papua II. Bagi sebagian pendukungnya, perjuangan OPM dipandang

sebagai usaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman dan bermartabat bagi masyarakat Papua.

Rekomendasi ini berisikan mengenai pembentukan sebuah tim yang bertugas dalam mempengaruhi Masyarakat internasional serta memohon Kerjasama kepada negara yang berada di Pasifik Selatan dalam Melanesia Spearhead Group (MSG) hingga terbentuknya sebuah kantor perwakilan OPM tersendiri di luar negeri, yang mana salah satu negaranya ialah Vanuatu.

Realitas global masih menunjukkan adanya sengketa bersenjata, agresi militer, intervensi asing, serta konflik internal yang melibatkan isu-isu seperti agama, etnisitas, nasionalisme, dan batas wilayah negara (Farukhi, 2018). Di tengah dinamika tersebut, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, salah satunya adalah gerakan separatisme yang terjadi di Papua, di mana sebagian kelompok masyarakat menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu Papua Barat menjadi salah satu agenda yang paling sensitif. Gerakan separatisme yang berlangsung puluhan tahun di Papua Barat menimbulkan kekhawatiran internasional, terutama terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan marginalisasi masyarakat asli Papua. Vanuatu, sebagai negara kecil di kawasan Pasifik, berperan vokal dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Papua. Vanuatu memanfaatkan forum MSG untuk memperjuangkan keanggotaan penuh ULMWP dan menyerukan pencabutan keanggotaan Indonesia sebagai anggota asosiasi, dengan alasan bahwa Indonesia bukan bagian dari komunitas etnis Melanesia.

Peneliti memandang bahwa dukungan Vanuatu terhadap gerakan Papua Merdeka tidak hanya didasarkan pada solidaritas etnis semata, tetapi juga merupakan refleksi dari konstruksi identitas nasional Vanuatu yang mengusung nilai-nilai anti-kolonialisme, *Melanesian Way*, dan *Melanesian Renaissance*. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk jati diri Vanuatu di tingkat domestik, tetapi juga mengarahkan strategi diplomasi luar negerinya. Vanuatu secara aktif mengadvokasi hak penentuan nasib sendiri bagi wilayah-wilayah Melanesia yang belum merdeka, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan komitmen historis terhadap perjuangan anti-penjajahan.

Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dengan beragam etnis, budaya, dan suku bangsa. Meskipun keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa, ia juga menghadirkan tantangan dalam menjaga integrasi nasional. Dinamika sosial yang kompleks kadang memicu konflik, diskriminasi, bahkan tuntutan pemisahan diri dari negara. Salah satu ancaman utama terhadap keutuhan negara adalah separatisme, yang terkait erat dengan isu kedaulatan wilayah (Bilyam, M.T., 2021). Secara konseptual, separatisme dapat mencakup pemisahan diri dari negara (*secession),* pembentukan wilayah otonom baru (*fragmentation*), atau tuntutan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*).

Indonesia telah menghadapi berbagai gerakan separatisme yang menimbulkan korban jiwa dan dampak sosial, salah satunya adalah Gerakan Papua Merdeka yang muncul akibat perasaan marginalisasi dan kesenjangan sosial-ekonomi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua. Respons militer dari pemerintah pusat dalam menghadapi gerakan ini kerap menuai kritik, terutama terkait dugaan

pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memunculkan tuntutan akan penyelesaian konflik yang lebih adil dan menghormati hak-hak sipil. Ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap kebijakan pemerintah mendorong sejumlah negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Papua, yang kemudian memengaruhi kebijakan luar negeri mereka dalam mengangkat isu ini ke forum internasional dan memperjuangkannya melalui jalur diplomasi.

Politik luar negeri Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan Papua dipengaruhi oleh hubungan historis dan kesamaan etnis antara masyarakat Vanuatu dan Papua. Secara konsisten, Vanuatu mempromosikan isu ini di berbagai forum internasional untuk mendapatkan dukungan global bagi perjuangan hak-hak masyarakat Papua. Dukungan ini didasari oleh visi "Melanesia Renaissance," yang bertujuan untuk memulihkan dan mengakui hak-hak masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik (Bilyam, M.T., 2021). Vanuatu berkomitmen untuk terus menyuarakan isu ini sebagai bagian dari solidaritas etnis dan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat Papua.

Konsistensi yang diberikan oleh Vanuatu bisa dilihat dari seringnya ia menyuarakan isu permasalahan Papua baik di forum regional maupun Internasional. Seperti pada sebuah kesempatan dalam Sidang Tingkat Tinggi HAM PBB yang ke-25 pada tanggal 4 Maret 2014, Vanuatu melakukan upaya diplomatiknya untuk kemerdekaan Papua yang mana pada saat itu disampaikan oleh Perdana Menteri moana Carcasses Katokai Kalosil, ia mendesak komunitas internasional untuk mendukung kemerdekaan terhadap Papua. Kemudian di tahun

2017, Vanuatu dan 6 negara lainnya menyatakan kekhawatiran mereka terhadap dugaan marginalisasi dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua pada sidang rutin Dewan HAM PBB ke- 34 (Kusuma, DKK 2021).

Pada artikel *Free West Papua Campaign*, dijelaskan bahwa Berbagai peran yang diberikan Vanuatu dalam mendukung kemerdekaan bagi Papua di forum MSG telah dilakukan dengan berbagai cara seperti, pada tahun 2018 Vanuatu bersama pemerintah Kepulauan Solomon dan Kaledonia Baru secara resmi mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG Leader's Summit. Vanuatu dan yang lainnya menyatakan bahwa Indonesia harus dikeluarkan dari MSG sebab bukan bagian dari Melanesia atau tidak benar-benar tertarik untuk membantu MSG.

Dukungan Vanuatu melalui forum MSG terhadap gerakan Papua Merdeka tidak hanya mencerminkan dinamika politik kawasan, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara kecil dapat memainkan peran signifikan dalam forum internasional. Melalui peran aktif ini, Vanuatu mencoba menegosiasikan identitas politiknya dan memperkuat posisinya di kawasan Pasifik Selatan, yang berdampak langsung terhadap hubungan internasional, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terhadap Peran Dukungan Vanuatu Melalui Forum Melanesian Spearhead Group (MSG) Terhadap Gerakan Papua Merdeka Tahun 2019-2020 dikarenakan isu ini memiliki relevansi strategis dalam hubungan Internasional, terutama dalam memahami bagaimana solidaritas etnis Melanesia memengaruhi kebijakan luar negeri Vanuatu.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Penulis menetapkan poin yang teridentifikasi sebagai masalah dalam penelitian ini:

a. Vanuatu memosisikan diri sebagai aktor vokal dalam isu Papua Merdeka melalui pemanfaatan Forum Melanesian Spearshead Group (MSG), namun peran dukungan tersebut masih menghadapi resistensi dari sebagian negara anggota yang memiliki kedekatan kepentingan dengan Indonesia.

b. Peran dukungan Vanuatu di MSG didorong oleh solidaritas Melanesia dan identitas anti-kolonialisme, tetapi pada saat yang sama menimbulkan implikasi diplomatik yang signifikan terhadap posisi Indonesia di kawasan Pasifik serta citranya di forum internasional.

1.3 Fokus Penelitian

Penulis menetapkan fokus penelitian ini kepada peran dukungan yang diberikan oleh negara Vanuatu kepada Papua mengenai gerakan Papua Merdeka di forum-forum regional maupun Internasional seperti Melanesian Spearhead Group di tahun 2019-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah terjabarkan sebelumnya, rumusan masalah yang didapat ialah “Bagaimana peran Vanuatu mendukung Gerakan Papua Merdeka melalui forum Melanesian Spearhead Group?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara objektif :

1. Menganalisis peran dukungan Vanuatu melalui Melanesian Spearhead Group terhadap gerakan Papua Merdeka pada tahun 2019-2020.
2. Mengidentifikasi tindakan politik yang diambil oleh Vanuatu dalam forum MSG terkait isu Papua Merdeka.
3. Mengetahui dampak dari dukungan yang diberikan terhadap hubungan internasional, khususnya antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik.

Tujuan penelitian secara subjektif:

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis di jurusan Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura
2. Untuk lebih memahami teori dan juga mengaplikasikannya di dalam kajian Hubungan Internasional

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi akademik yang dapat memperkaya kajian dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya dalam penerapan *Role Theory* dalam konteks diplomasi negara kecil terhadap isu separatisme di kawasan regional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman mengenai peran identitas etnis, solidaritas budaya, serta nilai-nilai regional dalam membentuk kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya di kawasan Pasifik Selatan.

1.6.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi mahasiswa, dosen, pengamat, serta praktisi Hubungan Internasional yang tertarik pada isu separatisme Papua dan dinamika diplomasi regional di Pasifik. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang lebih efektif, khususnya dalam merespons dukungan Vanuatu terhadap gerakan Papua Merdeka melalui forum Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tahun 2019–2020.